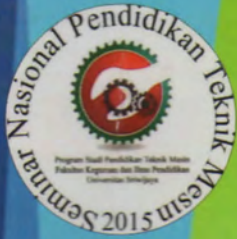


ISBN. 978-602-73579-0-7



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 2015

**“Transformasi Pendidikan Kejuruan
Menghadapi MEA”**

**Sabtu, 21 November 2015
Gedung Serbaguna Pascasarjana UNSRI
& Ruang Rapat FKIP Ogan Lt. 2 Palembang.**

Editor : 1. *Drs. Harlin, M.Pd.*
2. *Dra. Hj. Latifah Ratnawati M.Hum*
3. *Elfahmi Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.T.*

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Universitas Sriwijaya
Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

**Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan Teknik Mesin 2015
Universitas Sriwijaya**

Transformasi Pendidikan Kejuruan Menghadapi MEA

ISBN: 978-602-73579-0-7

Editor

Drs. Harlin, M.Pd

Dra. Hj. Latifah Ratnawati M.Hum

Elfahmi Dwi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.T.

Penyunting:

Drs. Harlin, M.Pd.

Nopriyanti, S.Pd., M.Pd

Desain sampul dan Tata Letak

Reza Saputra

Dewi Sartika, S.Pd.

Penerbit:

Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, FKIP UNSRI

Jl. Raya Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya

Telp. 0711- 580058

Fax. 0711- 580058

Email: psptm@fkip.unsri.ac.id

Website: <http://www.psptm.fkip.unsri.ac.id/>

Cetakan pertama, November 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin

Copyright @ 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan Tema "Transformasi Pendidikan Kejuruan Menghadapi MEA" dapat terwujud.

Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil penelitian dari berbagai ilmu yang berkaitan dengan pendidikan kejuruan yang telah dilakukan oleh Bapak/Ibu dosen dari Universitas Sriwijaya dan perguruan tinggi lain, serta mahasiswa yang dikumpulkan dan ditata oleh tim dalam kepanitiaan seminar nasional. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenalkan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan FKIP Unsri, Bapak Prof. Sofendi, Ph.D. yang telah memfasilitasi semua kegiatan seminar nasional.
2. Bapak/Ibu segenap panitia Seminar Nasional Pendidikan teknik Mesin yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya demi suksesnya kegiatan ini.
3. Bapak/Ibu dosen dan mahasiswa penyumbang artikel hasil penelitian dalam kegiatan ini.

Semoga buku prosiding ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan di berbagai bidang keilmuan khususnya di bidang pendidikan kejuruan. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan Negara dalam menghadapi MEA ke depannya. Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.

Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Palembang, 21 November 2015
Ketua,

Drs. Harlin, M.Pd
NIP. 1964080119910201002

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Muka	i
Editor dan Reviewer	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Makalah Inti	
Reformasi Pendidikan Vokasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Oleh : Prof. Soenarto, M.Sc., M.A., Ph.D. (<i>Dosen Fakultas Teknik & Pascasarjana UNY</i>)	2
Transformasi Pendidikan Kejuruan Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Apa, Mengapa, dan Bagaimana) Oleh: Prof. Dr. Sumarno, M.Pd. (<i>Prodi Pendidikan Teknik Mesin FT. Universitas Negeri Medan</i>)	9
Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Oleh: Drs. Widodo M.Pd (<i>Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan</i>)	17
Peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Oleh: Drs. H. Sidharta, SE., M.Si. (<i>Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir</i>)	23
Makalah Pararel	
Penerapan Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Matakuliah Termodinamika Di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Oleh: Mochamad Amri Santosa, Akhmad Burhan, Dewi Sartika (<i>Pendidikan Teknik Mesin FKIP Unsri</i>)	28
Pengembangan <i>E-Learning</i> Matakuliah Teknologi Motor Diesel Sebagai Upaya Mendukung Proses <i>Scientific Learning</i> . Oleh: Farhan Yadi, Ali Fikri Asri, Ahmad Burhan. (<i>Pendidikan Teknik Mesin, FKIP Universitas Sriwijaya</i>)	35
Pengembangan Buku Panduan Praktikum Pada Mata Kuliah Praktik Kendaraan I di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Oleh: Muhammad Puadi, Darlius (<i>Pendidikan Teknik Mesin FKIP Unsri</i>)	40
Pengembangan Media Pembelajaran <i>Jobsheet</i> Praktek Kendaraan 1 Dilengkapi Dengan Video Tutorial Pada Sistem Engine Bensin di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya Oleh: Wadirin (<i>PPs Pendidikan Teknologi Kejuruan S2, Universitas Negeri Yogyakarta</i>) Ali Fikri Asri (<i>Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNSRI</i>)	47

Transformasi Pendidikan Kejuruan Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (apa, mengapa, dan bagaimana)

Prof. Dr. Sumarno, M.Pd.

Prodi Pendidikan Teknik Mesin FT. Universitas Negeri Medan
Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan 20221 Telp (061) 6625971
masno63@yahoo.co.id

Abstrak

Pendidikan kejuruan dikonstruksi atas komponen konteks, input, proses, produk, dan outcome. Keberadaan komponen konteks menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan kejuruan tidak boleh dipandang sebagai suatu gejala persediaan (*supply phenomena*) dimana persoalan-persoalannya hanya terpusat pada bagaimana menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya dan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, tetapi pendidikan kejuruan juga harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan perubahan lingkungan pasar kerja (*demand driven*). Datangnya kesepakatan *Asean Economic Community 2015* (MEA), yang memimpikan terwujudnya pasar dan produksi tunggal, mendorong terjadinya *free movement of good, service, investment, skilled labour, and free flow of capital*. Globalisasi ini mengakibatkan perkembangan teknologi begitu cepat dan orientasi berbagai organisasi nasional maupun internasional meluas, mengakibatkan tututan terhadap tenaga kerja telah berubah. Kondisi konteks ini mau tidak mau harus disikapi oleh pendidikan kejuruan dalam mendesain dan melaksanakan program pendidikan sehingga sepadan (*match*) dengan perkembangan layanan (*service*) dan percepatan perkembangan teknologi. Dengan kata lain pendidikan kejuruan harus menata kembali sifat, bentuk, fungsi dan paradigma dirinya (melakukan transformasi).

Kata Kunci: Transformasi, pendidikan kejuruan

Pendahuluan

Deklarasi Cebu tanggal 12 Agustus 2007 menjadikan negara-negara Asean menyatu dalam satu kawasan masyarakat ekonomi dan memandang (1) pasar dan produksi tunggal, (2) kawasan ekonomi kompetitif tinggi, (3) kawasan pengembangan ekonomi yang adil, dan (4) kawasan terintegrasi dalam ekonomi global sebagai karakteristik kunci.

Masing-masing karakteristik kunci terdiri atas beberapa *core* elemen. Karakteristik kunci pasar dan produksi tunggal (*single market and production base*) terdiri atas lima *core* elemen, yaitu: *free flow of goods, free flow services, free flow of investment, free flow of capital, dan free flow of skilled labour*. MEA menjadikan negara Asean berbasis pasar dan produksi tunggal, Asean lebih dinamis, kompetitif dengan mekanisme dan pengukuran baru untuk menguatkan implementasi inisiatif ekonomi, mempercepat integrasi regional dalam sektor-sektor prioritas; memfasilitasi perpindahan pelaku bisnis, tenaga kerja terdidik dan berbakat, dan menguatkan mekanisme institusional (Asean Secretariat, 2008).

Dengan komitmen ini negara-negara anggota Asean sepakat untuk saling memfasilitasi dan memberi kemudahan untuk terjadinya arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terlatih secara bebas antar negara Asean. Arus kebebasan tersebut akan berdampak pada penyediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja dengan kemampuan (*skill*) yang tidak statis (mudah berubah) sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Perubahan kebutuhan *skill* dengan cepat menunjukkan telah terjadi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan (Grip & Heijke, 1998).

Secara khusus komitmen *free flow of skilled labour*, dan perubahan permintaan *skill* yang cepat akan sangat berpengaruh terhadap permintaan dan persaingan tenaga kerja terampil. Rantai berikutnya yang terkena imbas dari adanya perubahan permintaan *skill* tenaga kerja adalah pendidikan kejuruan. Untuk itu pendidikan kejuruan harus mau menata kembali sifat, bentuk, fungsi dan paradigma dirinya (melakukan transformasi).

Pengertian Pendidikan Kejuruan

Dewey menggambarkan pendidikan kejuruan sebagai proses sepanjang hidup yang membantu individu menemukan arah dan makna di dalam kehidupannya (Shumer, 2001). Berdasarkan pendapat Dewey dapat ditarik benang merah penjabaran bahwa pendidikan kejuruan telah ada dan sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia.

Pendidikan kejuruan bermula ketika orang tua mengajari anak-anaknya keterampilan-keterampilan (*skills*) yang dibutuhkan untuk melangsungkan hidup, seperti berburu pada masyarakat primitif. Pada masa itu anak-anak belajar keterampilan dari orang tuanya melalui melihat dan mencontoh proses yang dilakukan orang tuanya sehingga anaknya akan melakukan keterampilan yang sama dengan yang dilakukan orang tuanya (Gallinelli, 1979).

Dalam pembicaraan sehari-hari terdapat perbedaan yang cukup beragam tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan. Ada istilah pendidikan kejuruan, pendidikan teknologi, pendidikan teknologi dan kejuruan, dan *technical and vocational education and training* (TVET).

Secara konseptual pendidikan teknologi dan kejuruan tidak menambah kejelasan pengertian. Keterbatasan istilah "kejuruan" itu sendiri bila dikaitkan dengan kata dasarnya "juru" yang sangat sempit, yang berhubungan tenaga terampil setengah terdidik. Istilah yang banyak dipakai dalam berbagai teks adalah "*vocational education*", sedangkan pendidikan yang menghasilkan lulusan setingkat teknisi disepadankan dengan "*technical education*". Dalam hal ini, kurang tepat bila "*technical education*" diterjemahkan menjadi pendidikan teknologi, karena "*technical education*" mengacu kepada tingkat kualifikasi lulusan sebagai tenaga teknisi, sedangkan pendidikan teknologi mengacu kepada bidang spesialisasi, seperti teknik mesin, listrik, atau bangunan (Johar, 2007).

Pada tulisan ini penetapan istilah pendidikan kejuruan mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, dimana disebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pada Penjelasan Pasal 15 disebutkan bahwa:

- Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
- Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Penjelasan Pasal 15 di atas menunjukkan bahwa ada dua istilah yang digunakan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi dunia kerja, (1) pada pendidikan menengah disebut dengan pendidikan kejuruan, dan (2) pada pendidikan tinggi disebut digunakan istilah pendidikan Vokasi. Namun demikian pada tulisan ini yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan adalah menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Tantangan Dihadapi Pendidikan Kejuruan Pada Era MEA

Permasalahan yang dihadapi pendidikan kejuruan pada fase pendaya-gunaan (transisi dari sekolah ke industri) menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang ada atau yang dapat disediakan di pasar tenaga kerja dengan jumlah output pendidikan pencari kerja. Sedangkan persoalan yang bersifat kualitatif adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan yang dituntut oleh dunia kerja. Dalam situasi seperti ini walaupun kesempatan kerja banyak dan pencari kerja kurang, tetap akan terjadi pengangguran. Permasalahan kualitatif ini berkaitan dengan kesejajaran kompetensi yang dimiliki lulusan pendidikan kejuruan sebagai penyuplai tenaga kerja tingkat menengah yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Hal ini terjadi karena lapangan kerja mengalami perubahan begitu cepat, sedangkan pendidikan kejuruan akan selalu ketinggalan dalam merespon perubahan (Sumarno, 2007).

Berdasarkan survey *Training and Research Needs Analysis SEAMEO VECTECH* pada tahun 2013, ditunjukkan bahwa kecenderungan, masalah, dan tantangan yang dihadapi TVET ada 10, yaitu: (1) *TVET quality assurance* (2) *qualification framework* (3) *relevancy of curriculum to incorporate green technology, employability skills including entrepreneurship, and high order thinking skills* (4) *articulation* (5) *authentic teaching-learning and assessment* (6) *ICT in TVET* (7) *research development* (8) *access and equity* (9) *lifelong learning*, dan (10) *graduate employability* (Paryono, 2013).

Masih banyak tantangan yang harus diatasi TVET dalam menghadapi MEA, seperti kekurangan tenaga kerja terampil, latihan praktik yang terbatas baik pada SMK maupun PT, dan aturan pasar tenaga kerja yang terbatas (Kasim, 2014). Menurut Yaakub (2015) tantangan pendidikan tinggi Asean dalam menghadapi MEA antara lain: kekurangan staf fakultas yang berkualitas, penurunan iklim akademik, pengalaman proses penjaminan kualitas yang terbatas, kekurangan akses

untuk mahasiswa, kekurangan infrastruktur, fasilitas pendukung kemampuan bahasa Inggris, dan kemampuan meneliti terbatas.

Rantai berikutnya dari kondisi di atas adalah terjadinya ketidaksesuaian antara keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi inilah yang akan menghambat pertumbuhan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam MEA.

Menurut Kemenlu (2015), bonus demografi Indonesia merupakan modal besar untuk sukses dalam pelaksanaan MEA. Sayangnya Indonesia hingga kini masih berhadapan dengan kurangnya tenaga kerja yang berketerampilan tinggi dan profesional. *Boston Consulting Group* memprediksi perusahaan-perusahaan yang berpopulasi di Indonesia pada tahun 2020 akan menghadapi kesulitan dalam mengisi setengah posisi pekerjaan *entry-level* dan *middle-manager*.

Mengapa Pendidikan Kejuruan Perlu Melakukan Transformasi

Konsep investasi sumber daya manusia (SDM) berpangkal pada teori pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: tanah, modal, SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor SDM merupakan faktor yang paling menentukan, karena faktor lainnya itu tergantung pada faktor manusia (Gaffar, 1982).

Dalam proses pengembangan SDM ada tiga fase yang harus dilalui, yaitu fase persiapan, pendayagunaan, dan peningkatan. Fase persiapan adalah fase pendidikan. Fase pendayagunaan adalah fase transisi dari sekolah ke dunia kerja. Fase peningkatan adalah fase pengembangan SDM di dunia usaha (Gaffar, 1982).

Pada fase persiapan, proses pengembangan SDM umumnya dilaksanakan di lembaga pendidikan formal. Pada fase ini akan terjadi proses pengembangan pengetahuan, sikap nilai, keterampilan dan sensibilitas (Kidd, 1978), daya imajinatif dan spiritual (Mabud, 1999). Tujuan yang diharapkan dari fase ini adalah membantu lulusan lembaga pendidikan (sekolah) untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik, sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki melalui penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaan itu (Gaffar, 1982).

Upaya pengembangan kualitas SDM ini didasari atas kesadaran akan pentingnya SDM sebagai faktor utama yang menentukan mampu tidaknya suatu bangsa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan produk unggul (Dikmenjur, 2002) dan tenaga kerja yang terlatih dengan baik pada umumnya merupakan elemen prakondisi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Grip dan Heijke, 1998).

Pemikiran yang "meletakkan" SDM sebagai titik sentral usaha pembangunan seperti di atas akan memposisikan pendidikan sebagai fokus usaha dalam mewujudkan SDM yang berkualitas. Untuk itu pendidikan sebagai pranata (*means*) utama dalam pembangunan SDM harus secara jelas dalam berperan membekali peserta didik menjadi aset bangsa yang memiliki keahlian profesional, produktif, dan kemandirian (Dikmenjur, 2002).

Di Indonesia, lembaga pendidikan kejuruan (SMK) merupakan lembaga penyuplai tenaga kerja tingkat menengah. Tren perkembangan siswa SMK dari tahun 2012 hingga 2014 menunjukkan kenaikan berarti (jumlah siswa SMK tahun 2012 sebanyak 4.019.157 siswa; tahun 2013 sebanyak 4.189.519; dan 2014 berjumlah 4.199.657). Peran lulusan SMK perlu mendapat perhatian yang memadai, karena TVET sebagai pendorong utama dalam meningkatkan skill dan mobilitas tenaga kerja masa depan, dan selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas sektor bisnis dan mendorong perkembangan ekonomi (Kasim, 2014).

Menurut (Luz, 2014) dengan datangnya MEA khususnya elemen *free movement of labour* mempunyai implikasi kritis terhadap pendidikan dalam hal (1) diperlukannya ketentuan bekerja yang mengacu standar dan harmonisasi dengan maksud untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja dalam wilayah tertentu. (2) dibutuhkan sekelompok skill baru dan dasar-dasar kebiasaan bekerja, dari pada sekedar skill teknik atau juru teknik.

Dalam rangka menghadapi MEA, khususnya untuk menghadapi *free flow of skilled labor*, TVET harus menyediakan skills baru untuk pemuda Indonesia untuk mendapatkan income yang layak dan berhasil dalam pekerjaannya dan hidupnya. Oleh karena itu tugas pendidikan kejuruan adalah untuk meningkatkan kualitas latihan TVET dan membekali siswa dengan skills yang dibutuhkan oleh pasar kerja (Kasim, 2014). Satu-satunya solusi untuk itu adalah peningkatan SDM melalui pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan harus menjadi salah satu referensi Indonesia untuk mencetak lulusan terampil dan siap bekerja di Asean (Kemenlu, 2015).

Bagaimana Inisiatif Pendidikan Kejuruan Menghadapi MEA

Satu-satunya yang konstan dalam sistem pendidikan kejuruan adalah kebutuhan siswa. Setiap siswa akan mencari program yang dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, sikap kerja,

pengalaman, wawasan dalam membantu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Tidak hanya sekedar pekerjaan, tetapi pekerjaan yang juga memiliki prospek karir yang baik (Depdikbud, 1997). Untuk itu pendidikan kejuruan harus mampu menjembatani kebutuhan siswa dan kebutuhan dunia industri yang selalu berubah-ubah.

Menurut Paryono (2013), ada tiga inisiatif untuk integrasi Asean yang berhubungan dengan TVET, yaitu: (1) pengembangan sumber daya manusia dan bangunan kapasitas, (2) pengakuan kualifikasi profesional, dan (3) integrasi industri antar wilayah untuk mendorong sumber regional. Dari ketiga inisiatif ini dapat diturunkan inisiatif yang lebih terperinci, yang dapat dilakukan pendidikan kejuruan dalam rangka mempersiapkan anak didik dalam menghadapi perubahan pasar kerja yang disebabkan oleh adanya kesepakatan MEA terutama elemen *free flow of skilled labour*.

1. Reorientasi Pendidikan Kejuruan

Ada beberapa perbedaan penggunaan istilah yang digunakan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2008 dan 2013. Pada Spektrum 2008, digunakan istilah bidang studi keahlian, program studi keahlian, dan kompetensi keahlian. Jumlah kompetensi keahlian ada 121. Pada Spektrum 2013, digunakan istilah bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian. Jumlah paket keahlian ada 128.

Pengelompokan spektrum hingga kompetensi keahlian atau paket keahlian menunjukkan bahwa program pendidikan kejuruan di Indonesia mengarah pada *firm-specific skills*. Model program ini hanya menitikberatkan pada keterampilan teknis untuk memenuhi kebutuhan proses-proses kerja tertentu, tidak atau kurang mempertimbangkan keterampilan yang relevan untuk keperluan yang akan datang.

Program pendidikan kejuruan yang mengarah pada model ini memberi peluang paling sedikit pada para lulusan untuk melamar pekerjaan atau bekerja ke perusahaan yang tidak sesuai dengan paket atau kompetensi keahliannya yang sangat spesifik. Misalnya siswa lulusan SMK dengan latar belakang kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor, mereka akan merasa tidak percaya diri untuk melamar bekerja di perusahaan otomotif (mobil). Karena lulusan pendidikan kejuruan yang diarahkan untuk memasuki perusahaan otomotif adalah mereka dengan latar belakang kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan. Begitu juga untuk kompetensi-kompetensi yang lainnya, mereka akan tidak percaya diri untuk memasuki pasar kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya yang sangat spesifik.

Menurut Lauder, Brouwn dan Ashton (Pavlova, 2006), untuk program pendidikan *firm-specific skills* yang diperlukan adalah pendidikan tinggi umum, kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengembangan skill melalui *in-house* sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Program pendidikan seperti ini dapat dijumpai pada pendidikan dokter spesialis, dimana pendidikan lanjutan dilakukan setelah yang bersangkutan menamatkan pendidikan kedokteran. Bagi dokter yang ingin mengabdikan spesialis mata, maka setelah kedokteran umum mereka harus mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan *firm* atau keahlian yang ingin ditekuninya. Selanjutnya setelah menjadi dokter spesialis mata, maka ia akan mengalami kesulitan bila harus menangani penyakit THT.

Mencermati spektrum SMK dan pendapat di atas, dan keluasan peluang pasar yang cenderung dapat dimasuki lulusan pendidikan/sekolah kejuruan, maka akan lebih baik bila pendidikan kejuruan yang cenderung mengarah pada *firm-specific skill* berubah menjadi *industry-specific skills*. Program pendidikan model *industry-specific skills* akan memberi peluang yang lebih luas kepada tenaga kerja dalam memasuki atau berpindah ke industri yang sejenis. Program pendidikan model *industry-specific skills* dapat dijumpai pada masa pengelompokan SMK sesuai dengan bidang keahliannya (STM, SMEA, SMK, dll) yang menggunakan jurusan untuk menunjukkan kompetensi keahlian. Pengelompokan kompetensi keahlian harus dilakukan dengan cermat, dengan melibatkan lembaga profesi, dan pihak industri (swasta).

Karena kemampuan industri (swasta) dalam mengelola teknologi industri dan informasi, dapat dijadikan sebagai bahan/ pengetahuan rujukan untuk memperkaya wawasan pendidikan kejuruan, maka untuk mengembangkan program pendidikan kejuruan yang berorientasi pada *industry-specific skills* juga dibutuhkan interaksi antara lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga training dan industri.

2. Program Learning Outcome dari Technical Skills → Employability Skills

Menurut Semeijn, Velden, & Boone (2000) karena perkembangan teknologi yang begitu cepat dan orientasi berbagai organisasi nasional maupun internasional meluas, mengakibatkan tututan terhadap tenaga kerja telah berubah, sehingga *traditional "hard" selection devices like educational*

background still count, but are not sufficient anymore. Hal ini berarti meletakkan latar belakang pendidikan sebagai indikator dimensi kompetensi sebagaimana yang dilakukan oleh pakar ekonomi terdahulu tidak memadai lagi.

Pada transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan, pendekatan ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*), keterampilan dan pengetahuan telah menjadi faktor utama dalam produksi, dan pengukuran kompetensi secara langsung merupakan langkah logis dalam menentukan dan memprediksi kesuksesan tenaga kerja di tempat kerja yang akurat dan handal (Van Loo & Semeijn, 2001). Menurut Grip & Heijke (1998) untuk menghadapi transisi dari ekonomi industri ke ekonomi pengetahuan yang ditunjukkan oleh perubahan kebutuhan skill dengan cepat diperlukan *employability skills*.

Employability skills menjadi makin penting sejak krisis ekonomi, dimana sejak krisis ekonomi tersebut mengakibatkan seseorang lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan tetap bekerja (Sanders & Grip, 2003). *Employability skills* (*technological skills, fundamental skills, personal management skills, dan team work skills*) adalah kelompok keterampilan inti yang dapat ditransfer yang menggambarkan fungsional sifat-sifat dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh tempat kerja (dunia usaha) pada abad 21. *Employability skills* tersebut diperlukan untuk kesuksesan pada semua level tenaga kerja dan semua level pendidikan (Overtoom, 2000).

Hasil pertemuan wakil industri dalam komite pengembang standar dalam rangka pengembangan keterampilan 2020, akan memperhatikan bahwa standar yang dikembangkan tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan teknis untuk memenuhi kebutuhan proses-proses kerja tertentu, tetapi juga mempertimbangkan keterampilan yang relevan (Depdikbud, 1997). Begitu juga yang dicantumkan dalam UU Sisdiknas tahun 2003, bahwa kurikulum pendidikan disusun dengan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya tuntutan dunia kerja, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta dinamika perkembangan global (Depdikbud, 2003).

Kedua pernyataan ini menyiratkan bahwa lulusan lembaga pendidikan (lebih khusus pendidikan kejuruan), diharapkan memiliki kemampuan *employability skills* bukan *technical skills* (keterampilan yang bersifat teknis, kemampuan yang bersifat mampu melakukan apa tanpa mampu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dinamika perkembangan global).

Menurut Sim (Luz, 2014) *free movement of skilled labour* mempunyai implikasi terhadap pendidikan berkenaan dengan permintaan sekelompok skill baru dan dasar-dasar kebiasaan bekerja, dari pada skill teknis atau skill juru. Manager pengembangan sumber daya manusia akan mencari tenaga kerja yang memiliki *soft skills* yang luas yang dapat dikembangkan dengan menggunakan metode belajar yang berbeda. *Soft skills* tersebut, yaitu: *personal skills, character building skills, dan organizational skills*. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa untuk menghadapi datang MEA dibutuhkan *employability skills* bukan *technical skills*.

Indikasi semua ini menunjukkan bahwa dengan datanya MEA, industri membutuhkan karyawan yang fleksibel dan memiliki kemampuan menghitung, berkomunikasi, bekerja dalam kelompok, kemampuan komunikasi, serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru (*employability skills*). Untuk itu pendidikan kejuruan harus mampu menyediakan program pendidikan yang baik, yang mampu membekali para lulusannya untuk memperoleh kerja yang lebih besar atau kemungkinan menghadapi berbagai kesempatan kerja. Dengan kata lain pendidikan kejuruan sebagai institusi pengembangan SDM tingkat menengah harus mampu mengembangkan/meningkatkan *employability skills* lulusannya yang sepadan dengan perkembangan pasar kerja bukan sekedar kemampuan yang bersifat teknis (*technical skills*). Sehingga lulusan pendidikan kejuruan akan mudah memasuki dunia kerja dan akan lebih *attractive* di dunia kerja.

3. Label SMK → Bidang Keahlian

Ada ungkapan "apalah artinya sebuah nama". Tapi bayangkan saja apabila kita diminta untuk mendatangi seseorang atau lembaga yang tidak memiliki nama. Jelas akan kesulitan untuk menemukan dimana orang atau lembaga yang tidak memiliki nama tersebut berada. Tidak itu saja, apabila pemberian nama yang tidak baik, atau tidak sesuai dengan keberadaannya pun akan mempunyai dampak yang kurang baik. Misalnya anak laki-laki diberi nama atau label perempuan, atau pemberian label lembaga yang sulit dirunut jenis usahanya.

Label SMK merupakan hasil peleburan dari beberapa nama sekolah kejuruan dengan ciri bidang keahlian yang berbeda, yaitu: teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, seni kerajinan dan pariwisata, agrobisnis dan agroindustri dan bisnis manajemen. Setiap SMK memiliki *core* bidang keahlian, masing-masing bidang keahlian terdiri atas program studi keahlian, dan kompetensi/paket keahlian.

Misalnya, SMK Teknologi dan Rekayasa, dengan Program Studi Keahlian Teknik Otomotif akan dilabeli berdasarkan Kompetensi Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Alat Berat, Teknik Perbaikan Bodi Otomotif, Teknik Sepeda Motor, dan Teknik Ototronika.

Untuk mengetahui latar belakang kompetensi keahlian dari lulusan SMK (skill) yang dimilikinya, bila menggunakan sekuensi berpikir deduksi, maka akan dimulai dengan pertanyaan "anda lulusan darimana SMK berapa ? bidang keahlian apa? Program keahlian apa, dan terakhir kompetensi keahlian anda apa ?"

Sekuensi berpikir untuk menelusuri lulusan SMK sama panjangnya dengan menelusuri lulusan perguruan tinggi, anda lulusan dari universitas mana ? fakultas apa ? jurusan apa ? dan terakhir prodi apa? Kasus seperti di atas akan lebih sulit lagi bila ada SMK dengan bidang keahlian dengan *core* tertentu tetapi juga menyelenggarakan program keahlian di luar *core* bidang keahliannya. Misalnya ada SMK dengan *core* Teknologi dan Rekayasa yang seharusnya menyelenggarakan program studi keahlian: Teknik Mesin, Otomotif, dan Bangunan tetapi juga menyelenggarakan prodi keahlian Tata Boga dan Tata Busana.

Kondisi ini tidak terjadi pada pendidikan kejuruan sampai dengan tahun 1996/1997 dimana sekolah kejuruan menggunakan label yang lebih mudah diketahui oleh DUDI. Misalnya STM adalah sekolah kejuruan dalam bidang keteknikan, dengan jurusan Teknik Mesin, Teknik Bangunan, Teknik Otomotif, Teknik Elektro, dsb. SMEA dalam bidang ekonomi (bisnis dan manajemen).

Pada saat itu, bila kita bertanya pada seorang lulusan STM, bisa dipastikan kita akan mengetahui keterampilan yang dimiliki oleh lulusan tersebut adalah bidang keteknikan. Selanjutnya kita bisa bertanya jurusan apa? Teknik Otomotif. Maka dapat diketahui bahwa lapangan kerja yang mungkin dapat dimasuki adalah DUDI bidang otomotif. Sedangkan lulusan SMK dengan bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program studi keahlian otomotif, dan kompetensinya teknik sepeda motor, akan mengalami kesulitan untuk memasuki pasar kerja otomotif (mobil) atau pasar kerja alat berat.

4. Sertifikasi Kompetensi Lulusan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Presiden menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema *pengakuan kemampuan kerja* yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu sumber daya manusia Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja, sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional. KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi

Untuk mengetahui dan mendapatkan *pengakuan kemampuan kerja* lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai standar (kerangka kualifikasi), maka lulusan pendidikan kejuruan harus memiliki paspor keterampilan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem pendidikan kejuruan dan pelatihan yang berbasis industri (bukan perusahaan). Paspor ini diberikan kepada mereka yang telah melalui **sertifikasi keterampilan/kompetensi**. Dengan paspor keterampilan ini akan:

- Memberi sebuah dokumen pada pemilik keterampilan, yang menyatakan dan mengakui (level KKNI) bahwa mereka telah mempunyai keterampilan dimaksud
- Memudahkan pengusaha untuk memilih pelamar kerja maupun untuk mempromosikan karyawan yang telah mempunyai keterampilan yang dibutuhkan.
- Memberi piranti pada pekerja dan pengusaha dalam merencanakan peningkatan maupun penambahan keterampilan baru secara sistematis dan diakui (Depdibud, 1997).

Untuk menindaklanjuti perlunya paspor keterampilan yang mengacu KKNI pemerintah tengah mempersiapkan program sertifikasi bagi lulusan SMK dengan menggandeng Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP) dan pihak industri. *National qualifications framework* (NQF) digunakan sebagai pranata untuk menyelenggarakan pengembangan, implementasi, dan memfasilitasi mekanisme yang transparan yang digunakan dalam penilaian, sertifikasi, dan pengakuan skills (Paryono, 2013). NQF harus memiliki link dengan industri dan dikembangkan dengan input dari industri dan badan profesi yang tepat (Aring, 2015).

Paspor keterampilan yang mengacu KKNI cakupan hanya terbatas di wilayah Indonesia. Untuk menghadapi MEA, Indonesia juga diharapkan mendorong pengembangan *Regional quality assurance framework* (RQAF) atau *regional qualifications framework* (RQF) yang bertujuan

mendapatkan pengakuan kualifikasi di Asean. Menurut Paryono (2013) RQF akan menyediakan sebuah titik acuan dan jaringan translasi untuk semua kualifikasi seluruh anggota Asean, dan RQF akan menguntungkan industri, lembaga pendidikan, dan pencari kerja untuk mengakui kualifikasi yang dikeluarkan dalam wilayah Asean.

SIMPULAN

1. Datangnya MEA akan menunculkan tantangan baru dan peluang baru bagi lulusan pendidikan kejuruan dalam memasuki pasar kerja yang lebih luas. Untuk meraih peluang, pendidikan kejuruan harus mampu menghadapi tantangan yang ada, yaitu: masalah jaminan kualitas lulusan, pengakuan atas keterampilan yang dimiliki lulusan baik secara nasional maupun regional Asean.
2. Spesialisasi yang mengacu pada kompetensi keahlian memberi peluang yang sangat sempit pada lulusan pendidikan kejuruan memasuki pasar kerja. Program pendidikan yang berorientasi pada *industry-specific skills* akan memberi peluang kerja yang lebih luas dibandingkan *firm-specific skills*.
3. Untuk menghadapi perubahan skill yang begitu cepat (dengan datangnya MEA) dibutuhkan *employability skills*, bukan *technical skills* (kemampuan teknis). *Employability skills* merupakan suatu keharusan untuk ditanamkan pada siswa SMK. *Employability skills* merupakan gabungan dari *hard skills* dan *soft skills*.
4. Pengakuan keterampilan atau paspor keterampilan sangat diperlukan untuk mendapatkan pengakuan dan standarisasi di wilayah nasional maupun regional. Untuk mendapatkannya dilakukan melalui proses sertifikasi yang melibatkan lembaga profesi, industri, dan lembaga pendidikan.

SARAN

1. Era MEA membawa konsekuensi persaingan tenaga kerja, untuk itu pendidikan kejuruan harus menata kembali sifat, bentuk, fungsi dan paradigma dirinya (melakukan transformasi)
2. Orientasi program pendidikan sekolah kejuruan sebaiknya diperluas dari *firm-specific skills* menjadi *industry-specific skills*.
3. Labelisasi SMK sebaiknya menggunakan label yang mudah diketahui program studi atau jurusan yang ada di dalamnya. Pemberian nama sesuai dengan bidang keahlian, misalnya STM, SMEA, dan keahlian menggunakan kata "jurusan" atau "program studi", misalnya mesin otomotif, tata rias, dll.
4. Karena perkembangan teknologi yang begitu cepat dan orientasi berbagai organisasi nasional maupun internasional meluas, mengakibatkan tututan terhadap tenaga kerja telah berubah, maka program learning outcome dari *technical skills* diarahkan menjadi *employability skills*.
5. Perlu dijalin kerjasama yang erat (bukan sebatas kerjasama di atas kerja) dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta. Dan informasi patut dijadikan bahan rujukan untuk memperkaya wawasan sekolah kejuruan.
6. Untuk mendapatkan pengakuan secara nasional pemerintah perlu mendorong pengembangan *National Qualification Framework* (KKNI) yang memiliki link industri dan dikembangkan dengan input dari industri dan badan sertifikasi profesi. Untuk mendapatkan pengakuan di lingkungan Asean pemerintah perlu mendorong pengembangan *Regional Quality Assurance Framework* (RQAF).

DAFTAR PUSTAKA

- Aring (2015). *Asean Economic Community 2015: enhancing competitiveness and employability through skill development*. ILO, Regional Office for Asia and the Pacific.
- Asean Secretariat (2008). *Asean Economic Community Blueprint*.
- Depdikbud (1997). *Keterampilan menjelang 2020 untuk era global*. Jakarta: Depdikbud.
- Dikmenjur. (2002). Pengembangan SDM melalui pendidikan kejuruan. Diakses dari <http://www.dikmenjur.forehosting.net/kebij>.
- Gaffar, M.F. (1982). *Perencanaan pendidikan: teori dan metodologi*. Jakarta: P2LPTK.
- Gallinelli, J. (1979). Vocational education, program at the secondary level: A review of development and purpose. Dalam Abramson, T; Tittle, C. K; dan Cohen L. London (Eds.), *Handbook of vocational education evaluation* (pp.19-36). London: Sage Publications

- Grip, A. de & Heijke, H. (1998). *Beyond manpower planning: ROA's labor market model and its forecasts to 2002*. Research Centre for Education and the Labor Market, Faculty of Economics and Business Administration: Maastricht
- Luz, J.M. (2014). *The Asean Economic Community and The three flow of skilled labor: a game-change for higher education institutions*. Diakses dari: www.brithiscouncil.ph/sites/default/files/juan_miquel_luz.pdf.
- Kasim, Musliar (2014). *Indonesia host The Regional TVET Conference 2014, Ensuring TVET quality towards Asean Economic Community 2105. Press Release*. Embassy of the Federal Republic of Germany. Diakses dari [www.jakarta.diplo.de/contentblob/4180996/Daten/...](http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/4180996/Daten/)
- Kemenlu (2015). Membidik Peluang MEA, Asean adalah kita. Meningkatkan daya saing melalui pendidikan kejuruan. *Buletin Masyarakat Asean*. Edisi 7/Maret 2015.
- Kidds, J.R. (1978). *An urgency: Adult education in and for development*. The Declaration of Dar es Salam, dalam buku Hall, Budd L, and Kidds
- Mabud, S. A. (1999). Peace Education and Interreligious Dialogue. *Muslim Education Quarterly*. Autumn Issue. 17(1).Cambrige: The Islamic Academic.
- Overtoom. (2000) *Employability skills: An update*. Eric Digest: Center on Education and Training for Employment. The Ohio State University.
- Pavlova, Margarita (2015).*Re-orientasi of TVET towards the future (notes)*. Griffit Institute for educational Research.
- Paryono. (2013). *Anticipating Asean Economic Community 2015: regional initiatives on human resources development and recognition of profesional qualification*. Diakses dari www.tvet-online.asia.
- Sanders & Grip, de (2003). *Training, task flexibility and low-skilled workers' employability*. Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market, Faculty of Economics and Business Administration.
- Semeijm, J., Velden, Van der, & Boone, C. (2000). *Personality characteristics and labour market entry: an exploration*. Maastricht: Research Center for Education and the Labour Market.
- Shummer.R. (2001). A new, old vision of learning, working, and living: vocational education in the 21st century. *Journal of vocational education research*.Volume 26 (3).
- Van Loo, J. & Semeijn, J. (2001). *Measuring competences in school-leaver survey*. Maastricht: Research Centre for Education and the Labour Market, Faculty of Economics and Business Administration.
- Yaakub, M.N. (2015). *Challenges in education towards the realization of Asean Community 2015*. Speccial Lecture.